

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Korban kekerasan seksual merupakan korban yang mengalami trauma fisik maupun mental serta kerugian akibat kekerasan seksual yang dialaminya, korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan sebagai upaya pengembalian kondisi korban baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Terdapat tiga jenis pemulihan yang diatur untuk korban kekerasan seksual yaitu pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan.

2. Pemulihan sebagai hak korban kekerasan seksual dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dikenal dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah menerima pelaporan korban kekerasan seksual atau orang yang menyaksikan terjadinya kekerasan seksual, selain itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai lembaga layanan pemulihan korban kekerasan seksual.

3. Berdasarkan hasil wawancara, pemulihan tidak dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak karena telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, karena ketidaksesuaian hal tersebut

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung belum dapat menjalankan perannya sebagai lembaga pelayanan yang salah satu tugasnya adalah pemulihan korban kekerasan seksual. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor, peran sebagai lembaga layanan korban kekerasan seksual, khususnya terkait pemulihan telah dilaksanakan. Dalam hal ini, pemulihan yang difokuskan pada pemulihan sebelum dan selama proses peradilan sebagian besarnya telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor juga menjalankan kerja sama dengan lembaga lain terkait pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang belum dapat dilakukan sehingga meningkatkan peran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut.

5.2 Saran

1. Karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan Undang-Undang baru yang mengatur mengenai kekerasan seksual, maka dibutuhkan sosialisasi mengenai jenis dari kekerasan seksual. Dengan demikian, maka setiap orang mampu memiliki kemampuan untuk menentukan suatu pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual dan melaporkannya, baik sebagai korban maupun sebagai saksi yang menyaksikan perbuatan yang masuk dalam kekerasan seksual.
2. Dengan adanya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual, dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut mengenai hak korban kekerasan seksual salah satunya pemulihan yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdapat di provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Karena adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai salah satu tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemulihannya, maka harus diberikan pemisahan kekuasaan antara lembaga tersebut dengan lembaga lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dalam menangani suatu kasus. Lebih baik Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak diberikan wewenang secara penuh agar dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemulihannya korban kekerasan seksual dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Jurnal :

Nabilah, Ghina, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual : Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Padjadjaran Law Review*. Vol. 10, No. 1, 2022.

Nursiman, Eko, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 2, 2022.

Siregari, Nur Fitriyani, Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18, No. 2, 2018.

Yuliantini, Ni Putu Rai, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1 No. 1. 2015.

Internet :

Aditya, Dimas Bagus, *Pakar UNAIR Bagikan Dua Tips Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Seksual*. <https://news.unair.ac.id/2021/09/10/pakar-unair-bagikan-dua-tips-pemulihan-bagi-korban-kekerasan-seksual/?lang=id>. Diakses pada 1 Desember 2022

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Stop Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Menteri PPPA Sampaikan Orasi Ilmiah UU TPKS*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4083/stop-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-menteri-pppa-sampaikan-orasi-ilmiah-uu-tpks>. Diakses pada 13 Maret 2023

Humas FHUI, *“Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda”* <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan>

[apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/](#). Diakses pada 25 November 2022

Isabela, Monica Ayu Caesar, “*Apa Itu RUU TPKS?*”
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16200051/apa-itu-ruu-tpks>. Diakses pada 25 November 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/korban>. Diakses pada 30 Maret 2023

Kemenko PMK, *Percepatan Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS*.
<https://www.kemenkopmk.go.id/percepatan-penyusunan-aturan-turunan-uu-tpks>. Diakses pada 30 Maret 2023

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pentingnya RUU TPKS Untuk Segera Disahkan*,
<https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-ruu-tpks-untuk-segera-disahkan>. Diakses pada 9 Desember 2022

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Glossary Perlindungan Perempuan.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/P#:~:text=Pusat%20Pelayanan%20Terpadu%20Pemberdayaan%20Perempuan,tindak%20kekerasan%2C%20termasuk%20perdagangan%20orang%2C>.
Diakses pada 6 Mei 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *KEMENPPA Apresiasi Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan UPTD PPA*.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4102/kemen-pppa-apresiasi-dikeluarkannya-surat-edaran-menteri-dalam-negeri-tentang-pembentukan-uptd-ppa>. Diakses pada 7 Mei 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Mengenal UPTD PPA*,
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd->. Diakses pada 8 Desember 2022

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)*,

<https://sidiaperka.kemennppa.go.id/unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada 19 April 2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Apa Itu Kekerasan Seksual*. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>. Diakses pada 6 Agustus 2022.

Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-pengesahan-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-rkuhp>. Diakses pada 26 Maret 2023

Mulyadi, *Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan*, <http://repository.uib.ac.id/2289/6/t-16105217-chapter3.pdf>. Diakses pada 2 Desember 2022

Pemerintah Kabupaten Bantul, *Dasar Hukum, Tugas, dan Fungsi*. <https://uptdppa.bantulkab.go.id/hal/dasar-hukum-tugas-dan-fungsi>. Diakses pada 25 November 2022

Nurhadi, *Ini Beda Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual*. <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>. Diakses pada 22 Oktober 2022.

Putri, Vanya Karunia Mulia, *Pengertian Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/07/100000569/pengertian-metode-kuantitatif-dan-kualitatif-dalam-penelitian>. Diakses pada 9 Desember 2022

Siaran Pers Komnas Perempuan, *Pengesahan RUU TPKS : Pastikan Implementasi Terobosan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Serta Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks>. Diakses pada 9 Desember 2022

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.